

# SKRIPSI

## GUGATAN *CITIZEN LAWSUIT* DALAM PENGUATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA *PEER TO PEER* *LENDING* (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1206 K/PDT/2024)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

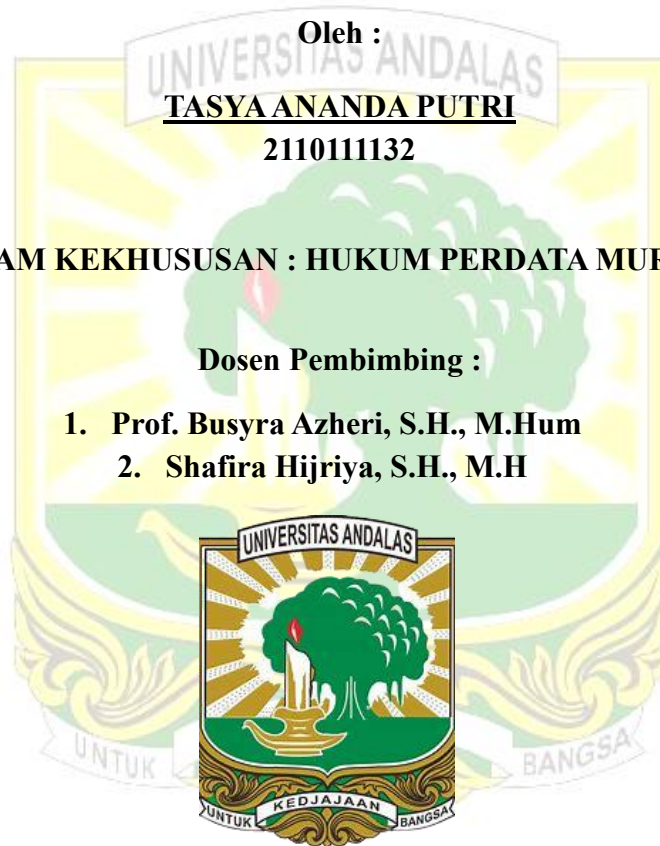
**TASYA ANANDA PUTRI**

2110111132

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**

**Dosen Pembimbing :**

1. Prof. Busyra Azheri, S.H., M.Hum
2. Shafira Hijriya, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2025**

**No.Reg: 13/PK-I/II/2026**

	No. Alumni Universitas	Tasya Ananda Putri	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 21 <sup>th</sup> Maret 2004 b. Nama Orangtua : Irwan Nasri, Ade Sriwahyuni c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Murni e. No. BP : 2110111132		f. Tanggal Lulus : 22 <sup>nd</sup> April 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan i. IPK : 3,75 j. Alamat : Jl. Datuk Kabu, Gg. Pisang 24. Tembung. Medan

**GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DALAM PENGUATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
PENGUNA PEER TO PEER LENDING (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1206 K/PDT/2024)  
(Tasya Ananda Putri, 2110111132, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 87 Halaman, 2026)**


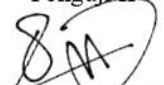
**ABSTRAK**

Di tengah perkembangan teknologi yang terjadi saat ini menyebabkan maraknya penggunaan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online (Pinjol). Namun, selain memberikan kemudahan, pinjol ini juga memunculkan berbagai permasalahan, seperti suku bunga tinggi, penagihan yang intimidatif, penyalahgunaan data pribadi, dan lemahnya perlindungan konsumen. Masyarakat sebagai pengguna layanan ini sering kali menjadi korban, sementara lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap lamban merespons atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam menjatuhkan putusan perdata terhadap Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam Penguatan Perlindungan Konsumen Pengguna *Peer to Peer Lending* dalam putusan MA No. 1206 K/PDT/2024? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban OJK pasca-Putusan MA No. 1206 K/PDT/2024?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian mengungkapkan adanya kontradiksi yurisdiksi di tingkat peradilan: Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Pusat (selaku *Judex Facti*) yang menyatakan gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena dinilai salah kamar dan seharusnya menjadi kewenangan PTUN atau MK. Sebaliknya, Mahkamah Agung (MA) (selaku *Judex Juris*) membatalkan putusan PN dan PT, menerima gugatan *Citizen Lawsuit*, dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. OJK merespons Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024 dengan komitmen untuk memperkuat pengawasan dan regulasi di sektor *Fintech P2P Lending* demi melindungi kepentingan masyarakat. Langkah nyata yang diambil meliputi penerbitan POJK Nomor 40 Tahun 2024 sebagai landasan operasional untuk menata manajemen risiko dan etika perlindungan konsumen. Selain itu, OJK mengimplementasikan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang fokus pada penguatan fondasi industri, perbaikan tata kelola, dan integritas pasar.

**Kata Kunci:** *Citizen Lawsuit*, Perlindungan Konsumen, *Peer to Peer Lending*, Putusan MA Nomor 1206 K/PDT/2024, Tanggung Jawab OJK.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 22<sup>nd</sup> April 2026.

Penguji

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	<b>Hj. Ulfanora, S.H., M.H.</b>	<b>Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum</b>


Mengetahui:

Ketua Departemen Hukum Perdata: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni Universitas	Tasya Ananda Putri	No. Alumni Fakultas
	a. Place/Date Of Birth : Medan/ 21 <sup>th</sup> Maret 2004 b. Parents' Name : Irwan Nasri, Ade Sriwahyuni c. Faculty : Law d. Concentration : Civil Law e. Student ID : 2110111132		f. Graduation Date : 22 <sup>nd</sup> April 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Lama Studi : 4 years 8 Month i. GPA : 3, 75 j. Address : Jl. Datuk Kabu, Gg. Pisang 24. Tembung. Medan

**CITIZEN LAWSUIT IN STRENGTHENING CONSUMER PROTECTION FOR PEER TO PEER LENDING USERS (Case Study of Supreme Court Decision Number: 1206 K/PDT/2024)**

(Tasya Ananda Putri, 2110111132, Faculty of Law, Andalas University, 87 Pages, 2026)


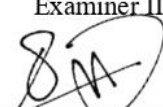
**ABSTRACT**

The current technological advancements have led to the proliferation of Peer-to-Peer Lending or online loans (Pinjol). However, in addition to providing convenience, these online lending platforms have also given rise to various issues, such as high interest rates, intimidative debt collection, misuse of personal data, and weak consumer protection. The public as users of these services often become victims, while supervisory institutions such as the Financial Services Authority (OJK) are considered slow to respond or negligent in carrying out their supervisory duties. In protecting consumers using Peer-to-Peer Lending services. The problem formulations discussed in this thesis are: 1. How did the judges' considerations at the First Instance, Appeal, and Cassation levels in rendering civil decisions regarding the Citizen Lawsuit for Strengthening Consumer Protection of Peer to-Peer Lending Users in Supreme Court Decision Number. 1206 K/PDT/2024? 2. What form of accountability does OJK have after Supreme Court Decision Number. 1206 K/PDT/2024? The research method used is normative juridical with a statutory approach and case approach. The research results reveal jurisdictional contradictions at the judicial level: the District Court (PN) and High Court (PT) of Central Jakarta (as Judex Facti) stated the lawsuit as Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) because it was deemed to be in the wrong chamber and should fall under the authority of the Administrative Court (PTUN) or Constitutional Court (MK). Conversely, the Supreme Court (MA) (as Judex Juris) overturned the PN and PT decisions, accepted the Citizen Lawsuit, and stated that the Defendants had committed unlawful acts. OJK responded to Supreme Court Decision Number 1206 K/PDT/2024 by committing to strengthen supervision and regulation in the P2P Lending Fintech sector to protect public interests. Concrete steps taken include the issuance of POJK Number 40/2024 as an operational basis for managing risk protection and consumer protection ethics. Additionally, OJK implements the LPBBTI Development and Strengthening Roadmap 2023-2028, which focuses on strengthening industry foundations, improving governance, and market integrity.

Keywords: Citizen Lawsuit, Consumer Protection, Peer-to-Peer Lending, Supreme Court Decision Number 1206 K/PDT/2024, OJK Responsibility.

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by April 22<sup>nd</sup>, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Name	<b>Hj. Ulfanora, S.H., M.H.</b>	<b>Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum</b>

Acquainted,

Head of the Department of State Civil Law: **Dr.Devianty Fitri, S.H.,M.Hum**

  
Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: